

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SYSTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MORALITAS  
INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DANA DESA  
( PADA PEMERINTAH DESA SEKECAMATAN ADONARA TENGAH)**

**Marwah Yusuf<sup>1</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (STIEM Bongaya)

[Marwah\\_yusuf@yahoo.com](mailto:Marwah_yusuf@yahoo.com)

**Aswar<sup>2</sup>**

[Universitas Indonesia Timur](http://Universitas Indonesia Timur)

[aswar.phobia@gmail.com](mailto:aswar.phobia@gmail.com)

**Irmawati Ibrahim<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (STIEM Bongaya)

[lw7737397@gmail.com](mailto:lw7737397@gmail.com)

**Yusdhaniar<sup>4</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (STIEM Bongaya)

[yusdhaniar529@gmail.com](mailto:yusdhaniar529@gmail.com)

**Fulia Indah Waty<sup>5</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (STIEM Bongaya)

[indahwatyskesen@gmail.com](mailto:indahwatyskesen@gmail.com)

---

**Abstract**

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:  
22 Oktober 2020

Tanggal Revisi:  
5 Januari 2021

Tanggal Diterima:  
4 Juni 2021

Publikasi On line:  
3 Juli 2021

*This research was conducted to find out the effect of Internal Control System Apparatus Competence and individual Morality on Fraud Prevention of Village Funds in Central Adonara Distric. Data collection used in this study is primary data obtained from questionnaires , a population of peole, with a saturated sampling method, so that the number of people is 35 people. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression techniques, which have passed the Normality Test, and prerequisites. The results of the hypothesis test show that there is a significant effect of all existing variabls, namely, individual morality, apparatus competence and internal contron system on the prevention of village fund fraud in the village government in the middle adonata sub-district.*

**Keywords:** apparatus competence, internal control system, and individual morality

**Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner, Populasi berjumlah 65 Orang, dengan metode pengambilan sampel jenuh, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 35 Orang. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan tehnik regresi linear berganda, yang telah melalui uji Normalitas, dan uji Prasyarat. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel yang ada yaitu, moralitas individu, kompetensi aparatur dan system pengendalian intern terhadap pencegahan fraud dana desa pada pemerintah desa sekecamatan adonara tengah*

**Kata Kunci:** kompetensi aparatur, system pengendalian intern, dan moraliras individu

## PENDAHULUAN

Undang-undang Desa telah menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengelolah sumber dana sebagai upaya pengoptimalisasian potensi yang dimiliki dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dana desa yang dimandatkan kepada Pemerintah dalam mengalokasikan Dana Desa yang telah dianggarkan pada setiap periode (tahun) melalui APBN yang dialokasikan pada setiap pemerintah desa sebagai sumber pendapatan desa. Dana desa ini adalah anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Dana tersebut merupakan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan jumlah paling sedikit diterima adalah 10% dari APBN. Dana yang diberikan harus digunakan secara terkendali dan konsisten. Alokasi dana desa digunakan untuk kegiatan yang berdasarkan prinsip dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Segala bentuk laporan yang dikerjakan bisa dipertanggungjawabkan dan harus transparan. Kompetensi merupakan karakteristik perilaku yang menggambarkan sifat, konsep diri, motif, keterampilan seseorang dan kualitas pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Untuk menata dana desa yang besar diperlukan aparatur yang berpotensi tinggi dibidangnya. Ciri-ciri Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi yaitu berpengetahuan, memiliki kemampuan, berketerampilan, dan bersikap berdasarkan fungsi tugas dan jabatan yang diembannya, serta selalu termotivasi untuk bekerja secara efektif, efisien dan produktif. System pengendalian intern disebut juga kontrol intern merupakan sebuah tahap yang dipengaruhi sumber daya manusia dan system teknologi informasi, yang bertujuan untuk membantu lembaga atau organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan, pengukura, dan mengarahkan sumber daya dalam satu organisasi. System ini memiliki peran penting dalam mendeteksi penggelapan (*fraud*), mencegah, dan melindungi sumber daya organisasi, baik yang nyata (seperti lahan dan mesin) maupun yang tidak nyata (seperti hak kekayaan intelektual seperti merek dagang atau reputasi). Dalam system pengendalian intern tercakup struktur-struktur organisasi, metode serta ukuran yang dikoordinasikan dalam mempertahankan kekayaan organisasi, mengetes ketelitian dan keunggulan data akuntansi, dan memberi dorongan dalam mengefisiensi kepatuhan kebijakan manajemen. Puspasari (2021) menyatakan Moralitas individu akan dijelaskan dalam tingkat penalaran moral, yang akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Kecurangan Akuntansi sangat berkaitan erat dengan tingkat Moralitas Individu hal tersebut menunjukkan perilaku yang illegal (tidak menurut hukum). Pencegahan *fraud* adalah tanggungjawab manajemen. Internal auditor bertanggungjawab dalam menilai dan menguji efektivitas tindakan dari manajemen dalam memenuhi kewajibannya. Pencegahan kecurangan bukan suatu hal mudah, karena fraud bisa terjadi dalam berbagai macam cara seiring perkembangan ekonomi dan perkemangan zaman. Dapat disimpulkan, bahwa defenisi fraud itu merupakan sebuah tindakan illegal ( tidak menurut hukum) dan kriminal yang dilakukan manusia agar memperoleh keuntungan intuk dirinya sendiri. Cara-cara perbuatan kriminal itu dapat berupa pelanggaran kepercayaan, penyembunyian, dan juga tipu daya. Meskipun program dana desa telah banyak memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Desa, namun dalam pengelolaannya masih menyisahkan berbagai macam permasalahan. “Berdasarkan temuan Himpunan Mahasiswa Adonara Tengah (HIPANARA) dalam hal ini ketua Hipanara FX. Wulan Tukan mengungkapkan bahwa terdapat pengurangan volume pekerjaan bak reservoir 1 di dusun hone desa hokohorowura dari 61m<sup>3</sup> menjadi 54m<sup>3</sup> sehingga air dari reservoir 1 tidak mencapai reservoir 2 yang mana tidak mengalir ke 5 desa penerimaan manfaat. Hal ini menyebabkan proyek peningkatan sistem pengelolaan air minum (SPAM) di Kecamatan Adonara tengah Kabupaten Flores Timur NTT senilai Rp.2.189.000.000 dari APBD 2017 di duga gagal dan penuh korupsi “ (sumber: POS KUPANG.COM, Ryan Nong). Pencegahan kecurangan dibutuhkan untuk mengendalikan dan mencegah munculnya kecurangan dengan menciptakan kondisi agar bisa mendorong upaya pencegahan kecurangan (*fraud*). *Fraud* terhadap pengelolaan keuangan desa dapat dicegah melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pemakaian sistem pengendalian intern. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2016) menunjukkan bahwa aparatur yang memilki kompetensi dalam bidang keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern juga efektif akan lebih berpotensi mencegah kecurangan. Kemudian Pura (2019) melakukan

penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Kinerja pengelolaan dana desa yang semakin baik menunjukkan bahwa kecurangan terhadap pengelolaan desa semakin kecil. Selanjutnya hasil penelitian Wulandari & Nuryanto (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. [9] Beberapa hasil penelitian tersebut bermakna bahwa semakin tinggi kompetensi dan semakin efektif sistem pengendalian intern maka besar potensi untuk mencegah terjadinya *fraud*. Lebih lanjut Atmadja dan Saputra (2016) mengatakan bahwa agar tidak ada bentuk kecurangan dalam mengelolah keuangan desa dan upaya mencegah *fraud* sedini mungkin maka perlu adanya sikap moral dari aparatur desa. Aparatur desa yang memiliki moral yang baik maka sangat kecil berpotensi melakukan kecurangan dan lebih berpotensi untuk mencegahnya. Sehingga moralitas individu sangat menentukan seseorang berpotensi melakukan kecurangan dan mencegah kecurangan tersebut. Penelitian Rahimah, Murni dan Lysandra (2018) yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan, lingkungan pengendalian, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* atau kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan penyajian lingkungan pengendalian dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dari beberapa uraian diatas maka peneliti merumuskan sebuah judul yaitu "Pengaruh Kompetensi Aparatur, sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Sekecamatan Adonara Tengah".

## TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Fraud

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 mengatakan *fraud* merupakan sebuah tindakan yang mengandung niat atau unsur kesengajaan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, penipuan, manipulasi atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara ilegal yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa yang dilakukan oleh seorang atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai atau pihak ketiga. Kecurangan merupakan upaya memanipulasi yang secara sengaja dilakukan untuk mencuri harta atau hak pihak lain. Menurut Eliza (2015) kecurangan merupakan penipuan yang disengaja, untuk mengambil harta orang lain. Kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan diartikan sebagai salah saji laporan keuangan. Kecurangan tersebut dapat berupa rasua (korupsi). Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan tidak jujur seperti penyimpangan atau penyalahgunaan kedudukan yang bertujuan untuk mengambil sumber daya orang atau uang/harta atau organisasi melalui penipuan, tipu muslihat, kecurangan, kelicikan, akal bulus, penghilangan, saran yang salah, penyembunyian atau cara lain yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, yang menimbulkan kerugian organisasi atau pihak lain atau menguntungkan perilaku (Purba, 2015). *Fraud* (manipulasi) adalah perbuatan yang disengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam kelompok manajemen, pihak ketiga, pengawas karyawan dengan cara memanipulasi agar dapat memperoleh keuntungan secara tidak halal (melawan hukum). (Tuankotta, 2015:194). Menurut Tuanakotta (2010), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2004) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pemberantasan dan pencegahan kecurangan, menggolongkan kecurangan dalam tiga golongan yaitu: korupsi (*Corruption*), Penyalahgunaan asset (*asset missaprotiation*) dan pernyataan palsu (*fraudulent statement*).

### Pencegahan Fraud

Pencegahan *fraud* merupakan sebuah upaya yang integrasi yang dilakukan untuk menekan terjadinya faktor pemicu *fraud*, yaitu memperkecil peluang akan terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai-pegawai agar ia dapat memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membenarkan atau rasionalisasi *fraud* yang dilakukan. Menurut *The Institut of Internal Auditor*, pencegahan *fraud* melibatkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah pelaksanaan kecurangan dan membatasi ekposur kecurangan itu ketika terjadi (Widiyarta, Herawati dan Atmadja, 2017). Menurut Karyono (2013) dalam Wahyuni dan Nova (2018) pencegahan *fraud* adalah aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Upaya pencegahan *fraud* akan memberi penghematan yang besar karena biaya deteksi, investigasi dan proses peradilan dapat ditekankan bahkan ditiadakan.

Pencegahan dilakukan untuk meminimalisir tindakan kecurangan. Pencegahan *fraud* (kecurangan) menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) adalah upaya yang terintegritas yang dapat menekan terjadinya factor penyebab *fraud*, yaitu untuk memperkecil peluang terjadinya kecurangan, menurunkan tingkatan pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi alasan untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. Adapun strategi-strategi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan menurut Kurniasari dkk; (2018) yaitu: mengawasi system pengawasan dan pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, merumuskan nilai anti-*fraud*, menerapkan system *reward* dan *punishment* yang tegas, sosialisasi atas pendidikan anti-*fraud* bagi pegawai, membentuk agen perubahan. Pencegahan kecurangan didefinisikan oleh BPKP (2008a) sebagai upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan, yaitu peluang, dorongan, dan rasionalisasi. Tujuan pencegahan kecurangan antara lain mencegah terjadinya kecurangan pada semua lini organisasi, menangkal pelaku potensial, mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi pada pelaku kecurangan. Adapun metode pencegahan kecurangan yang dapat dilakukan, meliputi penetapan kebijakan anti-*fraud*, menciptakan prosedur pencegahan baku, membangun struktur organisasi dengan pengendalian yang baik, merancang teknik pengendalian yang efektif, dan menumbuhkan kepekaan terhadap kecurangan.

### **Kompetensi Aparatur**

Berdasarkan aturan pemerintah melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 maka kompetensi dapat didefinisikan sebagai keahlian atau pengalaman pendidikan, pengetahuan, yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan ataupun tentang hal-hal di bidang tertentu. Hasil Penelitian Rahmawaty (2015) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan), yang bermakna bahwa jika seorang aparatur memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan maka akan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian diatas senada dengan temuan Sudiaranti, dkk (2015) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan penerapan sistem pengendalian intern. Hasil ini menunjukan bahwa Semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah dengan memaksimalkan system pengendalian internal maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud*. Aspek-aspek kompetensi menurut Gordon (1988) dapat dibagi menjadi 6 aspek yaitu: nilai, kemampuan, minat, pengetahuan, pemahaman, dan sikap.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Berdasarkan aturan pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengendalian intern adalah proses dirancang, diimplementasikan dan dimonitor oleh pimpinan dan personel entitas yang bertanggung jawab terhadap tata kelola entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas. Tuanakotta (2012) mengatakan pengendalian internal merupakan tindakan awal dalam melakukan pencegahan *fraud* (kecurangan). Pencegahan *fraud* pada umumnya merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam penetapan kebijakan, prosedur dan system yang membantu sebuah tindakan yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk memperoleh suatu keyakinan yang mantap dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang efisien dan efektif. IAPI dalam Sukrisno, (2012:100) pengendalian intern adalah tahap yang dilakukan oleh beberapa orang yaitu: personalia, manajemen, dan dewan komisaris, yang dirancang untuk memperoleh suatu keyakinan yang mantap terkait dengan efektifitas dan efisiensi operasi, kendala pelaporan keuangan dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam tuanakotta, (2015:94) Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yaitu: *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian), *risk assessment* (penilaian resiko), *control activities* (kegiatan pengendalian), *information system* (system informasi), dan *monitoring* (pemantauan).

### **Moralitas Individu**

Perkataan mora dari bahasa latin *mores*, jama kata *mos* yang artinya adat kebiasaan. Moral berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ajaran terkait baik dan buruknya mengenai akhlak, kewajiban, sikap dan budi pekerti yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Sehingga moral dijadikan sebagai alat ukur dalam bertindak, berpendapat, dan bersikap terkait penilaian baik dan buruk. Moral merupakan semua norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Moralitas individu merupakan kemampuan penalaran moral seseorang untuk memutuskan masalah pada situasi dilema etika dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan yang akan dilakukan etis atau tidak. Moralitas individu terdapat penalaran moral sebagai proses penentuan benar atau salah dalam mengambil suatu keputusan etis (Umam, 2010). Menurut Rahimah, Murni, dan Lysandra (2018) moralitas individu dapat dinilai dengan beberapa item diantaranya: kesadaran seorang pegawai terhadap tanggungjawab suatu entitas, nilai kejujuran dan etika, menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas dan sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur. Teori perkembangan moral dikemukakan oleh Kohlberg (1995) memiliki pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku etis. Tahapan perkembangan moral merupakan ukuran tinggi rendahnya moral seorang yang didasarkan dari perkembangan penalaran moralnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kohlberg pada kasus dilema moral untuk mensurvei perbedaan perilaku seseorang dalam menangani perkara moral yang sama. Ada tiga langkah dalam perkembangan moral yaitu: tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional*, dan tahapan *post-conventional*. Liyanarachi (2009) memaparkan bahwa tingkat penalaran moral individu akan berpengaruh terhadap perilaku etis mereka. Seorang yang memiliki tingkatan penalaran yang rendah akan berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki tingkatan penalaran yang tinggi. Semakin tinggi tingkat penalaran moral seseorang, maka orang tersebut akan melakukan hal-hal yang benar. Seseorang akan melakukan sebuah tindakan karena ia takut akan hukum/peraturan yang ada apabila berada pada tahapan yang paling rendah (prakonvensional). Selain itu individu pada tingkatan moral ini juga akan melihat kepentingan pribadinya sebagai suatu hal utama untuk melakukan suatu tindakan. Tahap kedua (konvensional), individu mendasarkan tindakannya pada persetujuan keluarga dan teman-temannya dan juga pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Pada level tertinggi (pasca-konvensional), sebuah individu mendasari tindakan yang dilakukannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum yang universal. Menurut Rest (2000), mengatakan bahwa semakin tinggi moral seseorang maka kemungkinan mereka akan melakukan hal-hal yang baik.

### **METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Adonara Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua bulan (agustus-September 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang ada di 13 desa di Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, yakni sebanyak 65 aparat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, dan Kepala Urusan Pembangunan. Teknik sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh sehingga jumlah sampelnya sebanyak 65 orang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa kuesioner, sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden atau pengambilan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada objek yang diteliti untuk mengetahui penilaian terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam bentuk angka. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda, sebelum metode analisis ini dilakukan, ada beberapa tahapan pengujian yang harus dilakukan yaitu, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji validitas adalah ukuran yang menandakan tingkat kevalidan (kebenaran) sesuai instrumen. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas tinggi, begitu juga sebaliknya instrument yang kurang valid mempunyai validitas rendah. Syarat minimum yang digunakan agar dianggap telah memenuhi syarat adalah  $r_{hitung} \geq 0.3$  maka dinyatakan di nyatakan valid. Realibilitas dilakukan dengan uji statistik/realibilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrument cukup dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Untuk menyatakan suatu variable dikatakan realibel, jikalau alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur itu dinyatakan stabil, sehingga bisa diandalkan dan bisa diramalkan, agar bisa mencari reliabilitas instrumen yang skornya berupa skala bertingkat (*rating scala*) dapat pula menggunakan teknik *cronbach* alpha. Syarat minimum yang digunakan agar dapat dianggap memenuhi syarat adalah *cronbach*

alpha  $\geq$  0.6 maka dinyatakan di nyatakan realibel/andal. Kenormalan data dibutuhkan agar dapat menguji keselerasan akan suatu kepastian data yang diperoleh dari pengujian normalitas dapat dilakukan dengan SPSS. Uji normalitas memakai *kolmogarovsmimov* (K-S). Nilai signifikan  $<$  0.05 maka  $H_0$  ditolak, hal ini mengartikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Nilai signifikan  $>$  0.05 maka  $H_0$  diterima, hal ini diartikan bahwa data berdistribusi normal. Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada ditemukan ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila model asumsi heteroskedastisitas tidak memenuhi, maka model regresi dikatakan tidak valid sebagai alat dalam peramalan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi yang baik ialah tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi itu terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Kriteria dalam pengujian ini terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikan  $<$  0.05 dan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikan  $>$  0.05. Pengujian ini dilakukan agar dapat diketahui apakah semua variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian koefisien secara parsial adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya. Proses pengujian menggunakan uji t (t-test) dengan rumus :

$$t = \beta_i / (Se (\beta_i))$$

**Dimana :**

t = Nilai Hitung

$\beta_i$  = Estimator

Se = Standar error of estimator

Uji t dikenal dengan uji parsial yakni untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel bebas/variable Independen terhadap variable terikatnya/variable dependen yaitu apakah ada penagruh kompetensi aparatur (X1), pengendalian intern (X2), dan moralitas individu (X3), secara parsial atau secara terpisah terhadap pemahaman pencegahan fraud dana desa (Y). Koefisien determinasi dalam penelitian dilihat dari nilai  $R^2$  (nilai dari 0 sampai 1). Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat sejauh mana variabel independen dalam mempengaruhi variable dependen dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Adapun syarat yang perlu dipenuhi agar kita bisa memaknai nilai koefisien determinasi merupakan hasil uji F dalam analisis regresi linear berganda yang bernilai signifikan, yang berarti bahwa " ada pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y". Begitupun jika analisis dalam uji F ini tidak signifikan, maka nilai koefisien determinasi tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh dari variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Uji F dikenal dengan uji simultan yaitu untuk menguji apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen artinya apakah ada pengaruh kompetensi aparatur (X1), pengendalian intern (X2), dan moralitas individu (X3), secara simultan atau gabungan dari variabel independen terhadap Pemahaman pencegahan fraud dana desa (Y) variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil data yang diperoleh maka terlebih dahulu dilakuakan pengujian validitas dengan kriteria  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dimana  $r_{tabel} = 0,30$ . Yang dapat dilihat dari hasil perhitungan Spearman correlations (output-nya), sebagaimana dinyatakan dibawah ini:

### 1) Hasil Uji Validitas untuk Variabel Kompetensi Aparatur

Variabel Kompetensi Aparatur (X<sub>1</sub>) terdiri atas 6 indikator yang dipaparkan ke dalam 3 pernyataan. Untuk mengetahui hasil uji validitas variabel Kompetensi Aparatur (X<sub>1</sub>) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Kompetensi Aparatur (X<sub>1</sub>)

| No | Koefesien Korelasi (r) | Nilai Batas Korelasi | Keterangan |
|----|------------------------|----------------------|------------|
| 1  | 0.89                   | 0,30                 | Valid      |
| 2  | 0.85                   | 0,30                 | Valid      |
| 3  | 0.86                   | 0,30                 | Valid      |

Sumber: data primer, SPSS 20 data diolah sendiri (2020)

Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa nilai Koefisien Korelasi (r-hitung) pada semua item pernyataan variabel Kompetensi Aparatur ( $X_1$ ) memperlihatkan angka yang lebih besar dari Nilai Batas Korelasi ( $r_{tabel}$ ) (0,30), sehingga dapat dinyatakan bahwa dari semua item pernyataan  $X_1$  tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

2) Hasil Uji Validitas untuk Variabel Sistem Pengendalian Intern

Variabel system pengendalian intern ( $X_2$ ) terdiri atas 5 indikator yang dijabarkan kedalam 3 pernyataan. Untuk mengetahui hasil uji validitas untuk variabel system pengendalian intern ( $X_2$ ) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 System Pengendalian Intern ( $X_2$ )

| No | Koefesien Korelasi (r) | Nilai Batas Korelasi ( $r_{tabel}$ ) | Keterangan |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1  | 0.69                   | 0,30                                 | Valid      |
| 2  | 0.74                   | 0,30                                 | Valid      |
| 3  | 0.84                   | 0,30                                 | Valid      |

Sumber: data primer, SPSS 20 data diolah sendiri (2020)

Berdasarkan Tabel 2 nampak bahwa nilai r-hitung dari semua item pernyataan variabel system pengendalian intern ( $X_2$ ) menyatakan angka yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  (0,30), sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan ( $X_2$ ) tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

3) Hasil Uji Validitas untuk Variabel Moralitas Individu

Variabel moralitas individu ( $X_3$ ) terdiri atas 4 indikator yang dijabarkan kedalam 3 pernyataan. Untuk mengetahui hasil uji validitas untuk variabel moralitas individu ( $X_3$ ) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Moralitas Individu ( $X_3$ )

| No | Koefesien Korelasi (r) | Nilai Batas Korelasi ( $r_{tabel}$ ) | Keterangan |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1  | 0.88                   | 0,30                                 | Valid      |
| 2  | 0.90                   | 0,30                                 | Valid      |
| 3  | 0.85                   | 0,30                                 | Valid      |

Sumber: data primer, SPSS 20 data diolah sendiri (2020)

Berdasarkan Tabel 3 nampak bahwa nilai r-hitung pada semua item pernyataan variabel moralitas individu ( $X_3$ ) menunjukkan angka yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  (0,30), sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan ( $X_3$ ) tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 4. Pencegahan Fraud (Variabel Y)

| Nomor | Koefesien Korelasi (r) | Nilai Batas Korelasi (r) | Keterangan |
|-------|------------------------|--------------------------|------------|
| 1     | 0.77                   | 0,30                     | Valid      |
| 2     | 0.89                   | 0,30                     | Valid      |
| 3     | 0.95                   | 0,30                     | Valid      |

Sumber: data primer, SPSS 20 data diolah sendiri (2020)

Berdasarkan Tabel 4 nampak bahwa nilai r-hitung pada semua item pernyataan variable pencegahan fraud (Y) menunjukkan angka yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  (0,30), sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan Y tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Setelah melakukan uji validitas aka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's's Alpha* ( $\alpha$ ), yang diaplikasikan dengan program SPSS.20. Apabila nilai *Cronbach's's Alpha* (r-Alpha) minimal 0,60 maka alat ukur dinyatakan reliable (Nunnally, 1978).

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel                        | Koefisien Reabilitas Alpha ( $\alpha$ ) | Nilai Batas Alpha ( $\alpha$ ) | Keputusan |
|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| Kompetensi Aparatur (X1)        | 0.82                                    | 0,60                           | Reliable  |
| System Pengendalian Intern (X2) | 0.64                                    | 0,60                           | Reliable  |
| Moralitas individu (X3)         | 0.85                                    | 0,60                           | Reliable  |
| Pencegahan Fraud (Y)            | 0.74                                    | 0,60                           | Reliable  |

Sumber : data diolah dari hasil penelitian SPSS 20 tahun 2020

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang telah dilakukan yang tertuang pada tabel di atas, terlihat dari keseluruhan item pernyataan pada setiap variabel memiliki nilai koefisien *cronbach's alpha* di atas 0,60, Variabel Kompetensi Aparatur dengan *Cronbach's Alpha* 0.82, Variabel Sistem Pengendalian Intern dengan *Cronbach's Alpha* 0.64 kemudian Variabel Moralitas Individu dengan *Cronbach's Alpha* 0.85, dan Variabel Pencegahan Fraud dengan *Cronbach's* 0,74, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner untuk setiap variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten. Untuk selanjutnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dengan standar nilai *probability* lebih dari  $> 0,05$  maka dikatakan data berdistribusi normal. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6. Uji Normalitas**

| Variabel  | Asymp.sig ( $\alpha$ ) | Nilai Batas | Keputusan |
|---|------------------------|-------------|-----------|
| Kompetensi Aparatur (X1), Sistem Pengendalian Interen (X2), Moralitas Individu (X3), Pencegahan Fraud (Y) | 0.06                   | $> 0,05$    | Normal    |

Sumber : data diolah dari hasil penelitian SPSS 20 tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui nilai *probability* (Asymp.sig) sebesar 0,06 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Setelah melalau uji prasyarat maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan analisis Regresi linear Berganda, yang dilakukan dengan dua tahap yaitu Parsial dan Uji Simultan. Hasil uji Parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7. Hasil Uji T ( Uji Parsial )**

| Variabel                          | Asymp.sig ( $\alpha$ ) | Nilai Batas | Keputusan  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| Kompetensi Aparatur (X1),         | .043                   | $< 0,05$    | Signifikan |
| Sistem Pengendalian Interen (X2), | .002                   | $< 0,05$    | Signifikan |
| Moralitas Individu (X3),          | .022                   | $< 0,05$    | Signifikan |

Sumber: SPSS 20 data diolah sendiri (2020)

Berdasarkan tabel 7 diatas, maka dapat dikatakan hasil uji hipotesis pertama ( $H_{a1}$ ) menyatakan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa pada Pemerintah Desa Se kecamatan Adonara Tengah di terima. Hal ini dibuktikan dari nilai  $t_{hitung}$  Kompetensi Aparatur ( $X_1$ ) sebesar 2.105 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yakni sebesar 1.690 atau  $t_{hitung} 2.105 > 1.690 t_{tabel}$ . Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,043 ( $0,043 < 0,05$ ). Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel Kompetensi Aparatur ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah.

Hipotesis kedua ( $H_{a2}$ ) menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah di terima. Hal ini dibuktikan dari nilai  $t_{hitung}$  variabel Sistem Pengendalian Intrn ( $X_2$ ) sebesar 3.341 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yakni sebesar 1.690 atau

$t_{hitung} 3.341 > 1.690 t_{tabel}$ . Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,002 ( $0,002 < 0,05$ ). Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel System Pengendalian Intern ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah

Kemudian hipotesis ketiga ( $H_{a3}$ ) yang menyatakan bahwa Moralitas Individu berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan fraud dana desa pada Pemerintah Desa Se kecamatan Adonara Tengah juga diterima. Hal ini dibuktikan dari nilai  $t_{hitung}$  variabel Moralitas Individu ( $X_3$ ) sebesar 2.415 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yakni sebesar 1.690 atau  $t_{hitung} 2.415 > 1.690 t_{tabel}$ . Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,022 ( $0,022 < 0,05$ ). Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel Moralitas Individu ( $X_3$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah

Pengujian hipotesis untuk mencari pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memerhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat alpha 5%. Uji F ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis keempat ( $H_4$ ) yakni kompetensi aparatur, system pengendalian intern dan moralitas individu berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

| Variabel  | Asymp.sig (α) | Nilai Batas | Keputusan  |
|---|---------------|-------------|------------|
| Kompetensi Aparatur (X1), Sistem Pengendalian Interen (X2), Moralitas Individu (X3), Pencegahan Fraud (Y) | 0.000         | <0,05       | Signifikan |

Sumber: SPSS 20 data diolah sendiri (2020)s

Berdasarkan tabel 8 diatas maka dapat diketahui nilai probabilitas 0.000 jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Pencegaha Fraud pada Pemerintah desa Se Kecamatan Adonara Tengah atau dapat pula dikatakan bahwa kompetensi aparatur, system pengendalian intern dan moralitas individu berpengaruh secara silmutan terhadap Pencegahan Frud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Berdasarkan tabel diatas hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 8 Persamaan Regresi

| Variabel                          |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nilai Constanta (Y)               | - 2.124 |
| Kompetensi Aparatur (X1),         | .268    |
| Sistem Pengendalian Interen (X2), | .552    |
| Moralitas Individu (X3),          | .296    |

$$Y = 2.124 + 0.268X_1 + 0.552X_2 + 0.296X_3$$

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta 2.124 Hal ini menyatakan bahwa jika variabel kompetensi aparatur, system pengendalian intern dan moralitas individu. dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka Pencegahan Fraud akan menurun sebesar 2.124. Koefisien regresi pada variabel kompetensi aparatur bertanda positif sebesar 0,268, hal ini bermakna jika variabel kompetensi aparatur bertambah satu satuan maka variabel Pencegahan Fraud akan meningkat sebesar 0.268 satu satuan dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan. Koefisien regresi pada variabel system pengendalian intern bertanda positif sebesar 0.552, hal ini bertanda bahwa jika variabel system pengendalian intern bertambah satu satuan maka variabel Pencegahan Fraud akan meningkat sebesar 0.552 satuan dengan catatan variabel yang lainnya dianggap

konstan. Koefisien regresi pada variabel moralitas individu bertanda positif sebesar 0.296, hal ini berarti jika variabel moralitas individu bertambah satu satuan maka variabel Pencegahan Fraud akan meningkat sebesar 0.296 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Setelah dilakukan uji hipoesis secara parsial dan simultan , dan persamaan regresi maka selanjutnya dilakukan uji Koefisien Determinasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

| Variabel   | Adjusted R Square |
|--|-------------------|
| Kompetensi Aparatur (X <sub>1</sub> ), Sistem Pengendalian Interen (X <sub>2</sub> ), Moralitas Individu (X <sub>3</sub> ), Pencegahan Fraud (Y) | .624              |

Sumber :data primer,SPSS 20 data Diolah sendiri, (2020)

Berdasarkan tampilan output model summary pada tabel dibawah ini besarnya Adjurted R Square (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,624 (62%) nilai ini menunjukkan bahwa 62% variasi perubahan Pencegahan Fraud dana desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu Kompetensi Apartur (X<sub>1</sub>), Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>) dan Moralitas Individu (X<sub>3</sub>) sedangkan sisanya 38% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Dari hasil analisis data maka diperoleh hasil yang menunjukkan Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Begitupun secara parsial Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu berpengaruh signifikan Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah.

**PEMBAHASAN**

**a. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa SeKecamatan Adonara Tengah.**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa SeKecamatan Adonara Tengah. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel Kompetensi Aparatur bertanda positif sebesar 0.268, nilai signifiKAN (p value) sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 artinya signifikan. Secara lebih tepat hasil ini didukung oleh hasil perhitungan perbandingan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , diperoleh nilai  $t_{hitung} 2.105 > 1.690 t_{tabel}$ . Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka meningkatkan pencegahan fraud dana desa. Kompetensi atau kemampuan aparat desa menjadi komponen penting dalam pencegahan fraud dana desa. Oleh karena itu Pemerintah setempat berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan pemerintah baik melalui pendidikan maupun pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wonar, Falah dan Pangayo (2018).

**b. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa SeKecamatan Adonara Tengah.**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada pemerintah Desa SeKecamatan Adonara Tengah. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern bertanda positif sebesar 0.552, nilai signifikan sebesar 0.002 < 0,05, artinya signifikan. Kemudian hasil perhitungan perbandingan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , diperoleh nilai  $t_{hitung} 3.341 > 1.690 t_{tabel}$ . Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa SeKecamatan Adonara Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan Sistem Pengendalian Intern maka Pencegahan Fraud Dana Desa semakin baik. Salah satu tujuan dari

sistem pengendalian intern adalah untuk mencegah penyelewengan terhadap asset perusahaan. Oleh karena itu dengan menerapkan sistem penendalian intern yang baik maka upaya untuk mencegah fraud desa desa semakin maksimal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atmadja Dan Saputra Putra (2017).

**c. Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa SeKecamatan Adonara Tengah.**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada pemerintah Desa Se Kecamatan Adonara Tengah. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel Moralitas Individu bertanda positif sebesar 0.296, nilai signifikan (p-value) sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Dan hasil perhitungan perbandingan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , diperoleh nilai  $t_{hitung}$  2.415 > 1.690  $t_{tabel}$ . Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa SeKecamatan Adonara Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Moralitas Individu maka akan meningkatkan Pencegahan Fraud Dana Desa. Seseorang yang memiliki moral yang baik tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat dan negara. Aparat desa yang memiliki moral yang baik tentunya tidak akan menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola dana desa. Artinya tidak akan menyelewengkan dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahimah, Murni dan Lysandra (2018).

**d. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah.**

Hasil pengujian menyatakan bahwa secara simultan kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian dan Moralitas Individu berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Hasil pengujian statistik secara simultan *F test* diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 19.805 apabila dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  sebesar 3,4 adalah lebih besar daripada  $F_{tabel}$ nya ( $F_{hitung}$  19.805 >  $F_{tabel}$  3,4). Hal ini berarti variabel Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Kesimpulan ini diperkuat dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 yang jauh lebih kecil dari nilai signifikan yang disyaratkan sebesar 0,05.

Hal tersebut berarti jika Kompetensi Aparatur ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) dan Moralitas Individu ( $X_3$ ) secara bersama-sama mengalami kenaikan maka akan berdampak pada meningkatnya Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Begitupun sebaliknya jika Kompetensi Aparatur ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) dan Moralitas Individu ( $X_3$ ) secara bersama-sama mengalami Penurunan maka akan berdampak pada menurunnya Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Se Kecamatan Adonara Tengah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan Kompetensi Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah., Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah dan Moralitas Individu berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah. Adapun saran yang ingin diberikan peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah agar memperhatikan Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu karena mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pencegahan Fraud Dana pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2012, *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Basirruddin, Muhammad. 2014. *Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012*. Jom FISIP 1 (2).
- Daud ali, Mohammad, 2010, *Pendidikan Agama Islam*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eliza, Yulina, 2015, *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)*. Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No.1, 86-100.
- Gordon, 1988, *Pembelajaran Kompetensi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kohlberg, 1995, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Liyarachi, G. dan C. J. Newdick, 2009, *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on whistle-blowing: New-Zendral Evidence*. Journal of Business Ethics, 89 (1), 37-35
- Purba, Bona P, 2015, *Fraud dan Korupsi (Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasannya)*. Lestari Kiranamata: Jakarta.
- Rahimah, Laila, Yetty dan Shanti. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Lingkungan Pengendalian, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6. No. 12, 139-154.
- Robbins, Steppen P, 2002, *Behavioral Organizational Principles : Prinsip-Prinsip Prilaku Organisasi*, Terjemahan Dewi Sartika, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rahmawaty, Sri. (2015). *Pengaruh Komitmen Aparatur Fungsional dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Skripsi, Universitas Halu Oleo.
- Sutrisno, Edi, (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Sudiaranti, Ni Made., I Gusti Ketut Agung Ulupui., & I G. A. Budiasih. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Medan.
- Tuanakotta, Theodorus M, (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tuanakotta, Theodorus M, 2010, *Audit Forensik dan Audit Investigatif*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M, 2015, *Audit Kontemporer*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Umam, Khaerul, 2010, *Perilaku Organisasi*. Pustaka Setia: Bandung.
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 tentang kompetensi
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 tentang *pengendalian interns*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*
- peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang *sistem pengendalian Intern Pemerintah*
- Undang-undang. No. 6 Tahun 2014. Tentang *desa*
- Undang-undang Republik Indonesia. No. 5 Tahun 1979. Tentang *pemerintah desa*
- Wahyuni, Endang Sri & Nova, Itara, (2018). Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Satua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis), Jurnal Inovasi dan Bisnis, Vol.6, (2018) : 189-194